
MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI PERAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PURNA DALAM MENDORONG PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Kholifatul Munawaroh

Jurusan Administrasi Negara, STISIPOL Dharma Wacana

Email: kholifatul.munawaroh@stisipoldharmawacana.ac.id

ABSTRACT

Indonesian Migrant Workers (PMI) who have ended their employment contracts, are called purna PMI. Full PMI who have returned from working abroad bring enormous remittances. Remittances that are not managed properly will run out for consumptive purposes, so that it can cause purna PMI who have returned from working abroad to depart again as PMI. Therefore, purna PMI needs to be fostered and empowered with the aim of having sustainable income, thus having the opportunity to be able to create jobs for the surrounding communities. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Based on the results of the study, there is currently a purna PMI empowerment program, namely the Program (1) Productive Migrant Village by the Ministry of Manpower, (2) Empowerment program for PMI Gold by the National Agency for Placement and Protection of Indonesian Workers (BNP2TKI). This program is actually relatively good, but the program in East Lampung Regency has not run optimally. This is because there are still obstacles such as human PMI resources that are still lack of knowledge, difficult access to capital, marketing of entrepreneurial products that have not been maximized and lack of local partners who are involved in the empowerment process. This has led to the need for synergies in creating and implementing an empowerment model, which can be a reference model for empowerment of regions with full PMI follicle to encourage the achievement of sustainable development in East Lampung Regency

Keywords: PMI purna, Remittance and Empowerment

ABSTRAK

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang telah mengakhiri kontrak kerja mereka, disebut purna PMI. PMI penuh yang telah kembali dari bekerja di luar negeri membawa remitansi yang sangat besar. Remitansi yang tidak dikelola dengan benar akan habis untuk tujuan konsumtif, sehingga dapat menyebabkan purna PMI yang telah kembali dari bekerja di luar negeri untuk berangkat lagi sebagai PMI. Oleh karena itu, purna PMI perlu dibina dan diberdayakan dengan tujuan memiliki pendapatan yang berkelanjutan, sehingga memiliki kesempatan untuk dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, saat ini terdapat program pemberdayaan purna PMI, yaitu Program (1) Desa Migran Produktif oleh Kementerian Ketenagakerjaan, (2) Program pemberdayaan untuk PMI Emas oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Indonesia Pekerja (BNP2TKI). Program ini sebenarnya relatif baik, tetapi program di Kabupaten Lampung Timur belum berjalan optimal. Ini karena masih ada kendala seperti

sumber daya PMI manusia yang masih kurang pengetahuan, akses modal yang sulit, pemasaran produk wirausaha yang belum maksimal dan kurangnya mitra lokal yang terlibat dalam proses pemberdayaan. Hal ini menyebabkan perlunya sinergi dalam menciptakan dan menerapkan model pemberdayaan, yang dapat menjadi model referensi untuk pemberdayaan daerah dengan folikel PMI penuh untuk mendorong pencapaian pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Timur.

Kata Kunci: PMI purna, Remitansi dan Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga Masyarakat dapat mengetahui potensi dan permasalahan yang dihadapinya dan mampu menyelesaikannya. Menurut Widjajanti (2011) pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

Adanya tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) 2015–2030 yang merupakan pengganti tujuan pembangunan milenium (*Milenium Development Goals/MDGs*) menjadi respon untuk menangani berbagai masalah di dunia termasuk masalah pertumbuhan perekonomian dan pekerjaan yang layak. Secara ringkas *SDG's* memiliki 17 tujuan penting yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa di dunia. Poin penting *SDGs* di antaranya adalah untuk mewujudkan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan

yang layak. Hal ini sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa “Pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya”.

Pertumbuhan perekonomian salah satunya tercermin dalam usaha pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kreatif yang dikelola langsung oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memandirikan masyarakat dalam hal perekonomiannya. Perkembangan ekonomi kreatif membutuhkan kolaborasi antara berbagai aktor (*Stakeholders*) yang berperan dalam industri kreatif, yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah yang merupakan prasyarat mendasar. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dengan penerapan ekonomi kreatif yang dinilai sukses yaitu pembentukan usaha oleh kelompok-kelompok Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna, yang berhasil mengelola keuangannya pasca pulang dari luar negeri untuk memberdayakan masyarakat miskin

disekitarnya dan menyerap tenaga kerja disekitarnya.

Remitansi atau uang hasil kiriman pekerja migran menjadi sangat dominan terhadap keberlangsungan hidup rumah tangga seorang pekerja migran. Remitan secara langsung berperan meningkatkan pendapatan rumah tangga dan juga berpotensi terhadap penciptaan peluang-peluang ekonomi baru. Studi yang dilakukan oleh *Internasional Organisation For Migration dan Economic Resource Center for Overseas Filipinos* tahun 2007 menyebutkan bahwa remitansi menjadi sumber keuangan utama bagi sekitar 85 % rumah tangga pekerja migran. Studi yang dilakukan oleh Bank Indonesia tahun 2008 pun menunjukkan hal yang senada, yaitu remitansi adalah tulang punggung ekonomi rumah tangga pekerja migran, selain itu remitansi pada tingkat rumah tangga juga dapat digunakan sebagai strategi untuk pengentasan kemiskinan. Hal ini tidak saja terjadi pada jangka pendek (*current consumption*), tetapi juga pada peluang investasi dan produksi untuk jangka panjang (*Long term production*).

Provinsi Lampung merupakan daerah pengirim PMI terbanyak ke-6 di Indonesia dalam pengiriman PMI ke luar negeri dalam tiga tahun terakhir dari tahun 2016-2018 yaitu sebanyak 40.641 jiwa (Pusat penelitian pengembangan dan informasi (Puslitfo) BNP2TKI, 2018). Tingginya jumlah PMI yang berasal dari Provinsi Lampung ini menjadi perhatian khusus bagi BNP2TKI, terutama dalam hal pemberdayaan PMI purnanya dan pemanfaatan hasil remitansinya, dimana penelitian ini akan dilakukan di Provinsi Lampung karena

merupakan daerah pengirim PMI dengan remitan yang dihasilkan oleh PMI purna mempunyai jumlah yang cukup banyak. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi pemerintah setempat untuk mengelola dan mengawasi pengiriman PMI dari rekrutmen, penempatan hingga purna penempatan.

PMI yang memutuskan untuk menjadi wirausaha, biasanya persiapan dilakukan sejak awal keberangkatan, sehingga remitan yang dikirimkan ke tanah air akan di bagi menjadi beberapa bagian, sebagian digunakan untuk kebutuhan konsumsi sedangkan sebagian yang lain digunakan untuk ditabung. Menurut (Puslitfo BNP2TKI, 2011). Tabungan dari penghasilan selama bekerja akan digunakan sebagai modal untuk membuka usaha di tanah air. Usaha ini akan membuka lapangan kerja baru di lingkungan keluarga dan dapat menyerap tenaga kerja dari daerah disekitarnya.

Jumlah pengiriman PMI terbanyak di Provinsi Lampung berasal dari Kabupaten Lampung Timur dan merupakan kabupaten pengirim pekerja migran urutan ke-sebelas di Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini (2016-2018) dengan jumlah PMI sebanyak 14,997 jiwa (Puslitfo BNP2TKI, 2018). Dalam hal pemberdayaan terhadap PMI purna di Kabupaten Lampung Timur pertama kali diinisiatif oleh seorang PMI purna asal Korea Selatan di Kecamatan Labuhan Ratu pada tahun 2004. Keberhasilan dalam membangun wirausaha pertokoan kemudian menjadi inspiratif dan diikuti jejaknya oleh PMI purna setempat. Hingga akhirnya terbentuklah pasar rintisan PMI purna di Kecamatan Labuhan Ratu (Kompas, 2011). Artinya walaupun Kabupaten Lampung Timur merupakan lumbung PMI terbesar di Provinsi

Lampung, masih terdapat upaya pemberdayaan dan kesadaran dari PMI purna untuk memanfaatkan hasil remitansinya selama bekerja di luar negeri.

Seperti juga yang dilakukan masyarakat Desa Taman Endah, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Metro News (2015) memberitakan bahwa hampir semua masyarakat di desa tersebut atau sekitar 70 % anak mudanya menjadi PMI. Mayoritas memilih negara Korea Selatan sebagai negara tujuan bekerja. Namun demikian, masyarakat di Desa Taman Endah tersebut tidak menjadikan pekerjaan di luar negeri sebagai tujuan akhir. Setelah kurang lebih 3-5 tahun lamanya bekerja di Korea, mereka pulang ke kampung halamannya dan mengembangkan bisnis dengan modal usaha dari tabungan gaji selama bekerja menjadi PMI.

Beragam jenis usaha yang menjadi mata pencarian berkelanjutan PMI purna di Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo, diantaranya adalah bisnis budidaya ikan lele, ternak ayam petelur dan jenis usaha yang lain. Hal ini dimulai pemberdayaan oleh *Center for Indonesia Migrant Worker's* (CIMW) Jakarta, kemudian dilanjutkan oleh BP3TKI Lampung, untuk pertama kalinya Provinsi Lampung pada tahun 2017 mendirikan koperasi yang anggotanya PMI purna yang terletak di Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo. Koperasi dengan nama Koperasi TKI Purna Maju Lestari merupakan koperasi yang diinisiasi oleh Badan nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (BP3TKI) Lampung. Tujuan dibentuknya koperasi tersebut adalah agar para PMI purna yang telah kembali ke tanah air dan telah

berwirausaha di desanya dapat lebih maju dan (BNP2TKI, 2017). Kemudian setelah PMI purna berdaya dan mandiri, dibuatkan badan hukum untuk keberlangsungan usahanya sehingga tercapai tujuan paripurna yaitu tidak lagi bekerja di luar negeri, namun berwirausaha mengembangkan kampung halamannya.

Pengalaman yang diperoleh di daerah Purbolinggo ini dapat diharapkan menjadi suatu model pemberdayaan yang bisa dikembangkan di daerah lain. Berkaitan dengan upaya untuk mengkaji permasalahan pada fenomena pemanfaatan remitansi yang belum menyeluruh dilakukan oleh daerah-daerah lain sebagai kantong pekerja migran. Maka penelitian ini mengambil fokus di Kecamatan Purbolinggo yang telah berhasil membentuk model pemberdayaan PMI purna dengan pemanfaatan hasil remitan selama bekerja di luar negeri dan Kecamatan Way Jepara sebagai kecamatan dengan kantong buruh migran terbanyak. Kecamatan Way Jepara mempunyai jumlah PMI sebanyak 1142 dalam tiga tahun terakhir di Kabupaten Lampung Timur, kemudian sudah terdapat upaya pemberdayaan yang diberikan langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan berupa Desmigratif atau Desa Migran Produktif. Namun keberlangsungannya belum berjalan dengan baik untuk pemberdayaan terhadap PMI purna.

Efektifitas pembinaan PMI purna yang dilakukan oleh BNP2TKI dinilai belum optimal, karena masih belum menyentuh daerah-daerah kantong PMI yang lain, walaupun ada keberlangsungannya belum maksimal. Program kewirausahaan belum sepenuhnya dilakukan sebagai bekal kepada PMI dengan memasukkan materi

kewirausahaan pada program persiapan akhir pemberangkatan (PAP) yang diharapkan akan membuka wawasan PMI lebih dini. Dengan terbukanya wawasan calon PMI lebih awal, maka mereka tidak akan boros membelanjakan uangnya dan akan menginvestasikan kirimannya itu pada sektor-sektor produktif ketimbang konsumtif. Remitansi dan usaha PMI purna dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi ekonomi wilayah asal PMI.

Peneliti lebih berfokus kepada model pemberdayaan yang akan digunakan masyarakat melalui pemanfaatan remitansi PMI purna di Kabupaten Lampung Timur yang belum pernah menerapkan kewirausahaan pasca pulang bekerja dari luar negeri. Dengan demikian model pemberdayaan ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sesuai dengan tujuannya dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini hendak melihat bagaimanakah penerapan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi peran Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's) di Kecamatan Purbolinggo dan Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur dan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut.

METODE

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif

metode penelitian berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2013). Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Penelitian dilaksanakan di dua tempat yaitu di Kecamatan way Jepara dan Kecamatan Purbolinggo yang menunjukkan bahwa saat ini sudah ada program pemberdayaan PMI Purna, yaitu (1) Program Desa Migran produktif oleh Kementerian Ketenagakerjaan, (2) Program pemberdayaan PMI purna Emas oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). namun keberlangsungannya belum maksimal.

Fokus penelitian yang diambil peneliti yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi peran pekerja migran Indonesia (PMI) purna dalam mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*) di Kabupaten Lampung Timur:

1. Penerapan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi peran PMI purna dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di Kecamatan Purbolinggo dan Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur

2. Identifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi peran PMI purna dalam mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) Kecamatan Purbolinggo dan Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang telah digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yang menjelaskan dan menganalisis data dengan cara menggambarkan hasil penelitian melalui sejumlah data yang berhasil diperlukan penulis, kemudian menyajikan hasil dari penelitian tersebut yaitu model pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi peran pekerja migran Indonesia (PMI) purna dalam mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*) di Kabupaten Lampung Timur:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembelajaran bagi masyarakat agar dapat mandiri dalam mengelola segala potensi yang dimiliki dengan menumbuhkan rasa semangat berkarya secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Pada tahapan pemberdayaan ini peneliti melakukan riset di dua lokasi penelitian yakni Kecamatan Way Jepara dan Kecamatan Purbolinggo. Dimana masing-masing lokasi tersebut mempunyai

pola pemberdayaan yang berbeda satu sama lain. Untuk mempermudah menjelaskan pola pemberdayaan PMI Purna dan potensi yang ada pada dua lokasi tersebut, maka peneliti akan menguraikannya secara satu persatu sebagai berikut:

Pemberdayaan PMI purna di Kecamatan Way Jepara

Kecamatan Way Jepara merupakan Kecamatan dengan pengirim jumlah PMI terbanyak di Kabupaten Lampung Timur, sejak tiga tahun terakhir 2016-2018 Jumlah PMI yang berasal dari Kecamatan Way Jepara yaitu 1142 jiwa. Dengan jumlah terbanyak dalam tiga tahun berturut-turut, tentu hal ini dapat membawa dampak positif dengan remitan yang di bawa pulang oleh PMI apabila dimanfaatkan dengan baik. Oleh sebab itu, Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu stakeholder yang memiliki tugas dan kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap PMI juga melakukan upaya dalam menciptakan ketahanan dan kesejahteraan PMI dan keluarganya melalui dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Desa Migran Produktif atau Desmigratif. Program kementerian yang diluncurkan sejak 2016 ini baru dilaksanakan di beberapa daerah yang menjadi kantong-kantong PMI. Salah satu lokasi pelaksanaan program ini yaitu Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur.

Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) adalah upaya terobosan Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan serta memberi perlindungan bagi Calon

PMI/PMI di desa yang menjadi kantong-kantong PMI (desa pengirim PMI terbanyak) dengan menawarkan program-program unggulan yang dibutuhkan oleh CPMI/PMI dan keluarganya melalui pemanfaatan potensi lokal dengan tidak mengabaikan karakteristik daerah setempat. Salah satu program desmigratif ini juga membidangi penciptaan usaha produktif melalui pelatihan usaha, pendampingan usaha serta bantuan sarana usaha produktif hingga pemasarannya. Melalui program dimaksud diharapkan keluarga PMI mampu mengelola penghasilannya untuk menciptakan usaha-usaha produktif dalam skala mikro, kecil maupun menengah (UMKM).

Pemberdayaan PMI Purna di Kecamatan Purbolinggo

Berbeda dengan Kecamatan Way Jepara yang mempunyai Desa Migran Produktif atau Desmigratif dari program Kementerian Ketenagakerjaan yang diluncurkan sejak 2016 ini dilaksanakan di beberapa daerah yang menjadi kantong-kantong PMI. Sedangkan di Kecamatan Purbolinggo tidak jauh berbeda dengan kondisi di Way Jepara dimana banyak masyarakatnya yang menjadi PMI di Luar negeri. Akan tetapi mereka yang bekerja di luar negeri tidak menjadikannya sebagai tujuan utama, melainkan sebagai sarana untuk mengumpulkan modal usaha yang akan mereka kembangkan di daerah asal mereka sepulang bekerja dari luar negeri.

Koperasi dengan nama Koperasi TKI Purna Maju Lestari ini merupakan koperasi yang diinisiasi oleh BNP2TKI melalui unit pelaksana teknis di daerah yaitu BP3TKI Lampung. Koperasi yang didirikan oleh 27 orang anggota ini merupakan program kerja

BNP2TKI di tahun anggaran 2017. Tujuan dibentuknya koperasi ini adalah agar PMI purna yang telah kembali ke tanah air dan telah berwirausaha di desanya dapat lebih maju dan mandiri. Sebelum dibentuk koperasi, para PMI purna di desa ini memiliki paguyuban PMI purna. Kemudian komunitas tersebut disempurnakan dengan sebuah legalitas yaitu wadah berbadan hukum yang berwujud koperasi sehingga diharapkan akan mempermudah kegiatan usaha yang telah mereka rintis di kampung halamannya tersebut.

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sumodiningrat (2000) dalam Teguh (2004). Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Sebagaimana disampaikan di awal bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap seperti dikemukakan oleh Teguh (2004). Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

1. Tahap Penyadaran. Tahap ini menggambarkan bahwa pihak pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, agar dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.
2. Tahap Transformasi. Tahap ini menggambarkan masyarakat

mempunyai kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan

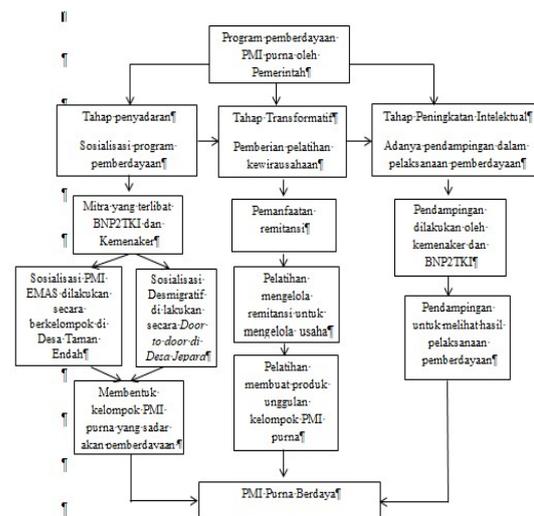
3. Tahap Peningkatan Intelektual. Munculnya kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Ketiga konsep tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Ambar Teguh ini dipilih oleh peneliti, karena penelitian ini menekankan pada penerapan model pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dapat berhasil menjadi model pemberdayaan dan acuan pemberdayaan bagi daerah-daerah lain dalam optimalisasi peran PMI purna untuk memberdayakan masyarakat miskin disekitarnya. Sehingga kemudian dapat melihat model pemberdayaan seperti apakah yang efektif bagi PMI purna di Kabupaten Lampung Timur. Selain itu juga, penggunaan ketiga tahapan ini juga dinilai peneliti dapat memunculkan kendala-kendala atau faktor pendukung dan faktor penghambat yang muncul dari penerapan model pemberdayaan PMI purna di Kabupaten Lampung Timur ini. Hal-hal tersebut kemudian akan menjadi acuan dalam penyusunan hasil dan pembahasan.

Setiap daerah memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan krena adanya tingkat keterbukaan dan potensi yang berbeda dari setiap masing-masing daerah. Dua kecamatan yang berbeda ini memiliki

latar belakang terbentuknya pemberdayaan yang berbeda dari sistem pemberdayaan hingga fasilitator pemberdayanya. Oleh sebab itu, evaluasi dan monitoring dilakukan oleh pihak pemerintah agar keberlangsungan pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*) di Kabupaten Lampung Timur.

Berikut ini penulis akan menggambarkan model pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi peran PMI purna di Kabupaten Lampung Timur berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di lapangan.



Gambar 1. Model Pemberdayaan PMI Purna
 Sumber: Hasil penelitian, 2019.

Tahap Penyadaran

Hasil dari adanya tahapan penyadaran tersebut akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Akan tetapi dengan latar belakang PMI purna yang berbeda-beda tentu akan menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan pemberdayaan. Seperti di Kecamatan Way Jepara yang belum berhasil dalam pelaksanaan tahapan penyadaran dikarenakan PMI purna yang belum mempunyai orientasi kebermanfaatan remitansinya. Sedangkan di Kecamatan Purbolinggo yang sudah memiliki kesadaran akan pentingnya pemberdayaan, karena PMI purnanya memiliki orientasi maju dalam memandirikan kehidupan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa tahapan penyadaran dalam proses pemberdayaan PMI purna di Kecamatan Way Jepara dan Kecamatan Purbolinggo memiliki perbedaan dalam proses penyadarannya. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa pola pemberdayaan yang berbeda dari latar belakang masyarakat serta PMI purnanya. Tahapan penyadaran di Kecamatan Way Jepara dengan Program Desmigratif yang belum berjalan dengan efektif dikarenakan orientasi PMI purna yang masih berperilaku konsumtif, membelajarkan hal-hal yang tidak penting, eksploitasi ekonomi oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya serta ketidaktahuan dalam mengelola remitansi. Untuk melakukan penyadaran dalam hal ini petugas desmigratif melakukan pendatan, identifikasi serta pemetaan terhadap PMI purna guna memberdayakan mereka agar bersedia melakukan wirausaha. Sedangkan kondisi PMI purna di Kecamatan Purbolinggo sedikit lebih baik dibandingkan dengan PMI purna di Kecamatan Way Jepara. Hal ini dikarenakan PMI purna memiliki pembekalan pra pemberangkatan

yang matang mengenai orientasi bekerja di luar negeri untuk mengumpulkan modal usaha. Sehingga saat mereka pulang ke Indonesia sebagian hasil remitansinya digunakan untuk membangun usaha berkelanjutan.

Tahap Transformasi

Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah memberikan pendayaan pada kemampuan membangun usaha produktif pasca pulang dari luar negeri. Pelatihan-pelatihan tersebut dapat dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan perusahaan yang sesuai dengan wirausaha yang dibangun oleh PMI purna supaya dapat menambah wawasan tentang cara produksi hingga pemasaran produk yang dihasilkan serta keahlian dari PMI purna itu sendiri. Namun pada tahap transformasi ini di Kecamatan Way Jepara masih terkendala dari kemauan PMI purna untuk membangun usaha produktif dan menjalankan tiga pilar desmigratif sehingga hanya sebagian PMI purna yang mau tergabung dalam usaha konveksi dan peternak kambing PMI purna, PMI purna ini beralasan bahwa keuntungan yang didapatkan relatif kecil dibandingkan dengan kembali bekerja di luar negeri atau mengurus perkebunan. Sedangkan di kecamatan Purbolinggo masing-masing dari PMI purna telah memiliki inisiatif untuk mengembangkan usaha produktifnya pasca pulang dari luar negeri dan memiliki paguyuban PMI purna sebagai tempat untuk bertukar pikiran serta telah diresmikan Koperasi PMI purna maju lestari yang telah berbadan hukum. Hal ini sebagai upaya untuk mempermudah PMI purna dalam meningkatkan usaha produktifnya dalam

bidang pemenuhan pakan ternak yang bisa di beli langsung melalui koperasi tersebut.

Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual

Pada tahap ini menggambarkan kecakapan keterampilan sudah terbentuk sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inovasi di lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ini, maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Konsep pembangunan masyarakat menggambarkan bahwa pada kondisi seperti ini seringkali didudukkan pada subjek pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah tinggal menjadi fasilitator saja. Sebagaimana disampaikan diatas bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap.

Peran pemerintah dalam hal memberikan pendampingan dan pelatihan sudah dilakukan namun partisipatif PMI purna masih kurang dalam membangun ekonomi berkelanjutan pasca pulang bekerja dari luar negeri. Hal ini disebabkan karena adanya Sumber daya manusia yang masih rendah, sehingga upaya pemberdayaan pun masih dianggap sebagai hal yang kurang menguntungkan bagi mereka yang memiliki remitansi. Selain itu, pelaksanaan tiga pilar Desmigratif lainnya masih terkendala sarana dan prasana yang belum memadai serta model pemberdayaan yang belum terencana matang bagi berlangsungnya pelayanan tiga pilar Desmigratif lainnya.

Tahapan pemberdayaan pada tahap peningkatan intelektual di Kecamatan Way Jepara belum berjalan dengan baik, karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap manfaat pemberdayaan serta belum terbukanya pemikiran mereka tentang ekonomi berkelanjutan membuat PMI purna hanya sedikit yang mau bergabung dalam usaha binaan. Hal ini dibuktikan dari adanya kelompok usaha PMI yang jumlahnya terus berkurang karena tidak tertarik dengan usaha kelompok yang dijalankan serta keuntungan yang didapatkan kecil serta pemasaran yang kurang maksimal.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Adanya program Desmigratif dan Koperasi TKI purna maju lestari dari Kementrerian Ketenagakerjaan serta BNP2TKI ini dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga secara otomatis peningkatan kualitas PMI purna dan lingkungan masyarakat yang terdampak pemberdayaan akan meningkat. Akan tetapi, program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BNP2TKI, tidak terlepas dari faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui optimalisasi peran PMI purna. Faktor pendukung yang paling dominan di sini dapat dilihat dari peran serta PMI purna atau beberapa pelaku usaha yang bersangkutan untuk meningkatkan ekonomi berkelanjutan dilingkungannya.

Sedangkan faktor penghambat dari pelaksanaan program yang telah diberikan di sini adalah juga berasal dari pihak masyarakat sendiri dan PMI purna yang masih berpikiran sempit dalam menjalankan

usahanya, sehingga mempengaruhi kualitas dari produksi usahanya, serta kondisi pihak mitra yang belum terlibat secara langsung dalam upaya pemberdayaan di Kabupaten Lampung Timur, serta daya beli konsumen yang tidak stabil akibat pemasaran dan promosi yang tidak maksimal.

Berikut ini penulis akan menyajikan berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan di Kecamatan Way Jepara serta Kecamatan Purbolinggo yang akan penulis uraikan secara satu persatu.

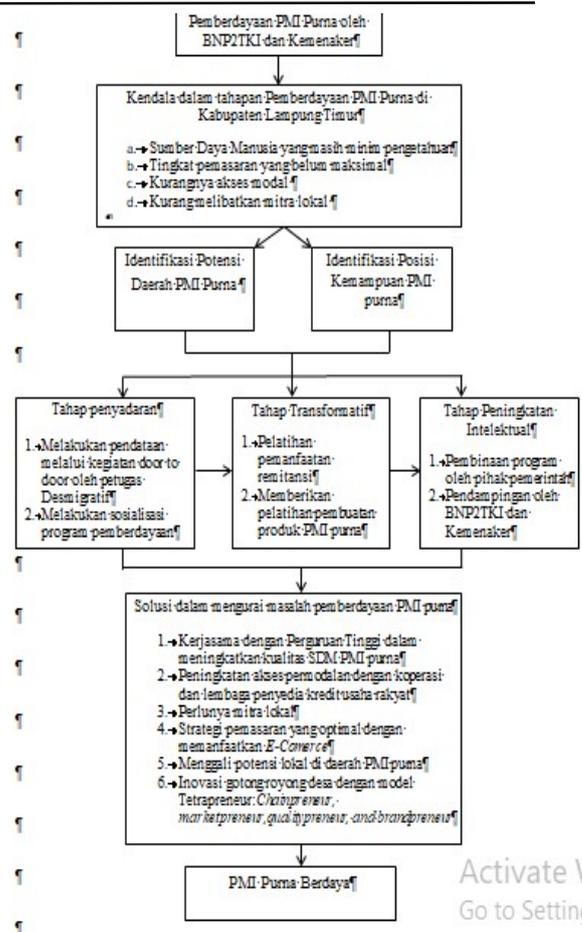
Faktor penghambat pemberdayaan di Way Jepara dan Kecamatan Purbolinggo:

- a. Sumber Daya Manusia yang masih minim pengetahuan
- b. Tingkat pemasaran yang belum maksimal
- c. Kurangnya akses modal
- d. Kurang melibatkan mitra lokal

Faktor pendukung pemberdayaan di Way Jepara dan Kecamatan Purbolinggo:

- a. Adanya program pemberdayaan dari pemerintah
- b. Tersedianya sarana dan prasarana dari pemerintah
- c. Potensi daerah PMI purna
- d. Adanya partisipatif masyarakat

Berikut penulis uraikan kembali model pemberdayaan berdasarkan hasil evaluasi pemberdayaan di Kecamatan Way Jepara dan Kecamatan Purbolinggo.



Gambar 2. Hasil Evaluasi Model Pemberdayaan PMI Purna

Sumber: Hasil penelitian, 2019.

Gambar tersebut menjelaskan bagaimana model pemberdayaan dibentuk sebagai upaya untuk menawarkan bentuk yang ideal dalam melakukan pemberdayaan PMI purna di Kabupaten Lampung Timur berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Way Jepara dan Purbolinggo.

SIMPULAN

Pelaksanaan tahapan pemberdayaan pada PMI purna di Kecamatan Way Jepara masih mengalami kendala. Pelaksanaan tahapan pemberdayaan pada PMI purna di Kecamatan Purbolinggo sudah berjalan

dengan baik, karena usaha produktif yang tumbuh sendiri dipelopori oleh PMI purna.

Faktor pendukung yang ada pada pemberdayaan PMI purna di Kecamatan Way Jepara dan kecamatan Purbolinggo yaitu keduanya memiliki program pemberdayaan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Sedangkan faktor penghambat yang ada pada pemberdayaan PMI purna di Kecamatan Way Jepara dan kecamatan Purbolinggo yaitu masih minimnya mitra lokal yang dapat memberikan akses sarana dan prasarana dalam menunjang pemberdayaan.

SARAN

1. Pihak pemberdaya (BNP2TKI dan Kementerian Ketenagakerjaan) seharusnya memetakan kondisi lingkungan PMI purna
2. Pemerintah mengoptimalkan peran mitra lokal seperti kelompok PKK, pemuda karang taruna, lembaga adat, lembaga agama, LSM dan tokoh peduli PMI
3. Sistem pelatihan, pembinaan, pendampingan usaha secara berkelanjutan untuk memonitoring dan mengevaluasi secara berkala setiap setahun sekali
4. Penerapan ekonomi digital *atau e-commerce* melalui pemasaran secara online dengan memanfaatkan media online shop di kalangan pelaku UMKM yang dijalankan oleh PMI purna
5. Perlu dirumuskannya model kemitraan usaha yang melibatkan berbagai pihak terkait untuk menjamin pelaku UMKM yang dijalankan oleh PMI purna agar dapat terus mengembangkan usahanya

DAFTAR PUSTAKA

- Megapolitan.kompas.com/read/2011/10/04/04263482/memelopori.pasar.rintisan.mantan.tki. diakses pada tanggal 23 Desember 2018.
- Metro News, (2015). <https://www.youtube.com/watch?v=HPMtYu7ysVM> diakses pada tanggal 30 Desember 2018
- Moleong, J. L. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pusat penelitian pengembangan dan informasi (Puslitfo) BNP2TKI (2011) "Studi Potensi Ekonomi TKI Purna di kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan".
- Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 15-27.
- WWW.BNP2TKI.go.id/read/1250/Tahun-2017-diresmikannya-koperasi-tki-purna-diLampung-InisiasiBP3TKI-Lampung. diakses pada tanggal 25 Desember 2018.